

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Menurut Suparmako (dalam Edianto, 2017: 1785), pembangunan ekonomi adalah suatu usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil per kapita. Selain meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui distribusi pendapatan yang merata, pembangunan ekonomi juga bertujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang dibutuhkan masyarakat, dengan demikian akan mengurangi pengangguran dan secara langsung dapat meningkatkan pendapatan nasional dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi, sedangkan pembangunan daerah berdasarkan yang dipublikasi oleh Bappenas merupakan bagian integral dan merupakan penjabaran dari pembangunan nasional dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan yang disesuaikan dengan potensi, aspirasi dan permasalahan pembangunan di daerah.

Dalam bukunya, Arsyad (2010: 374) menyatakan bahwa pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses kerja antara pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru dan merangsang perkembangan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam suatu wilayah. Penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai sub-sistem negara dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna

dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Sebagai daerah otonom, provinsi mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepentingan masyarakat dan mencukupi kesejahteraan masyarakat.

Sebagai bagian dari pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional, pembangunan ekonomi daerah juga berperan penting terhadap sukses tidaknya pembangunan ekonomi nasional secara keseluruhan. Masing-masing provinsi di Indonesia, termasuk provinsi-provinsi di Pulau Jawa, harus mampu mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, memenuhi target perencanaan ekonomi serta mampu mengatasi permasalahan pembangunan yang terjadi terutama dalam era otonomi daerah di mana masing-masing daerah memiliki kebebasan seluas-luasnya untuk mengelola kekayaan daerah yang dimiliki dan memanfaatkannya untuk kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.

Pertumbuhan ekonomi secara sempit dapat diartikan dengan meningkatnya produksi total suatu daerah. Selain itu pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai peningkatan pendapatan per kapita serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi tidak akan pernah lepas dari peranan para pelaku ekonomi yakni pemerintah yang berperan sebagai instrumen kebijakan publik dan fiskal, swasta yang berperan dalam pengembangan investasi dan masyarakat itu sendiri yang berperan sebagai *input* dari faktor produksi dan jaminan terciptanya pasar dalam perekonomian.

Salah satu indikator yang sering digunakan untuk melihat adanya gejala pertumbuhan ekonomi daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB),

karena di dalamnya mencerminkan kegiatan ekonomi yang dilaksanakan dan dicapai oleh penduduk selama periode tertentu. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) juga dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran dan kesejahteraan suatu daerah atau masyarakat.

Dalam pelaksanaan pembangunan, setiap daerah dituntut untuk dapat bisa dalam mencari sumber pembiayaannya. Salah satu sumber pembiayaan untuk pembangunan daerahnya yang pada akhirnya bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yaitu dengan adanya sumber-sumber penerimaan daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, sesuai dengan yang tertuang secara resmi dalam Undang-undang Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah.

Investasi yang juga disebut dengan istilah penanaman modal atau pembentukan modal merupakan komponen lain yang menjadi sumber penerimaan daerah. Menurut Sukirno (2015: 121), bahwa suatu tabungan dari sektor rumah tangga, melalui institusi-institusi keuangan akan mengalir ke sektor perusahaan. Apabila para pengusaha menggunakan uang tersebut untuk membeli barang-barang modal, maka pengeluaran tersebut dinamakan investasi. Maka dari itu istilah investasi dapat diartikan sebagai *“pengeluaran atau perbelanjaan penanam-penanam modal suatu perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perlengkapan untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian”*.

Pulau Jawa merupakan salah satu pulau di Indonesia yang memiliki tingkat penerimaan pendapatan daerah yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan pulau

lainnya di Indonesia, yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

Pada tabel 1.1 dapat kita lihat, PDRB setiap provinsi di Pulau Jawa mengalami kenaikan di setiap tahunnya. Walaupun begitu, terlihat bahwa pada tiga tahun terakhir (tahun 2015 dan tahun 2017) kenaikan nilai PDRB Provinsi Jawa Tengah sangat lambat bila dibandingkan dengan nilai kenaikan PDRB Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Timur. Perbandingan kenaikan nilai PDRB ke dua provinsi tersebut hampir dua kali lipat dari kenaikan PDRB Jawa Tengah. Sedang Provinsi D.I. Yogyakarta dan Provinsi Banten masih kalah dari Provinsi Jawa Tengah, mengingat kedua provinsi tersebut luas wilayahnya lebih kecil. Posisi tertinggi ditempati Provinsi DKI Jakarta, pada tahun 2017 yaitu sebesar 1.635.855,7 miliar rupiah. Selanjutnya diikuti Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat, masing-masing sebesar 1.482.147,6 miliar rupiah dan 1.342.953,4 miliar rupiah pada tahun 2017.

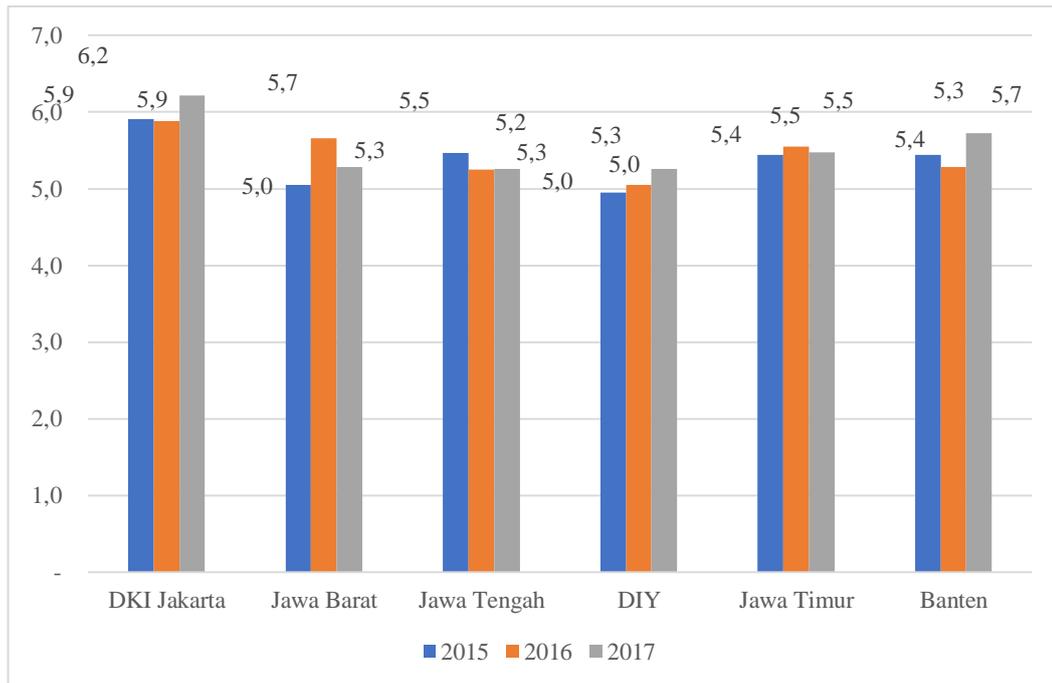
**Tabel 1.1 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010  
Provinsi di Pulau Jawa tahun 2015-2017 (miliar rupiah)**

Provinsi	2015	2016	2017	S u m b e r : P D
DKI Jakarta	1.454.563,8	1.540.078,2	1.635.855,7	
Jawa Barat	1.207.232,3	1.275.527,6	1.342.953,4	
Jawa Tengah	806.765,1	849.099,4	893.750,4	
DIY	83.474,5	87.688,2	92.300,7	
Jawa Timur	1.331.395,0	1.405.236,1	1.482.147,6	
Banten	368.377,2	387.835,1	410.045,9	

*RB masing-masing provinsi di Pulau Jawa Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha, 2010-2017. Badan Pusat Statistik. Data telah diolah.*

Dari tabel 1.1 tentang PDRB atas dasar harga konstan 2010 provinsi di Pulau Jawa 2015-2017 maka dapat dihitung laju pertumbuhannya pada gambar

1.1. Jika dilihat dari tabel tersebut, nilai PDRB tertinggi berada di Provinsi DKI Jakarta, hal ini dikarenakan DKI Jakarta merupakan Ibukota Indonesia, pusat pemerintahan, dan juga pusat ekonomi dan bisnis. Sebagian besar pergerakan perekonomian di negara ini didominasi di wilayah Ibukota.



**Gambar 1.1 Produk Domestik Regional Bruto provinsi di Pulau Jawa Tahun 2015 – 2017**

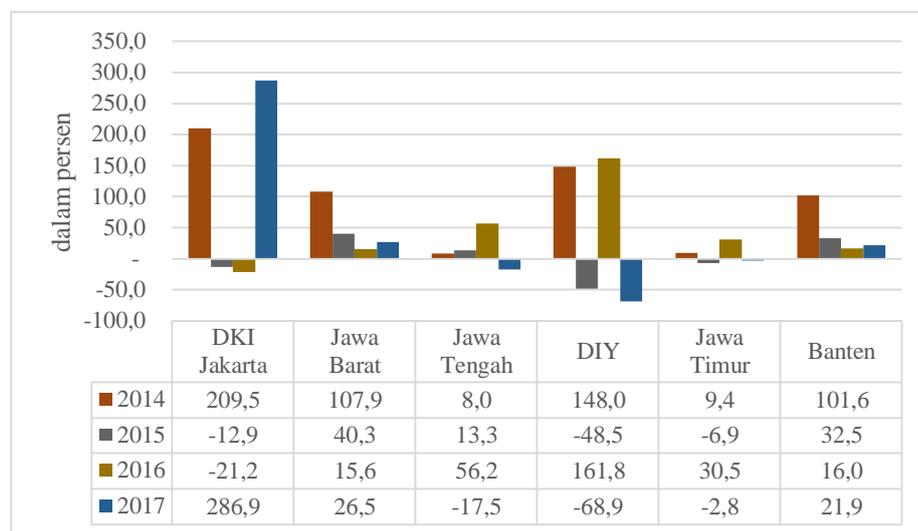
*Sumber: PDRB masing-masing provinsi di Pulau Jawa Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha, 2010-2017. Badan Pusat Statistik. Data telah diolah.*

Berdasarkan tabel 1.1 terlihat bahwa jumlah PDRB setiap provinsi di Pulau Jawa mengalami peningkatan secara konstan. Tetapi hal tersebut tidak membuat laju pertumbuhan ekonominya meningkat pula (gambar 1.1). Sebagai contoh, dari sekian miliar rupiah dari peningkatan PDRB Provinsi Banten hanya memberikan peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen di tahun 2016, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 5,4 persen. Lalu mengalami peningkatan kembali di tahun 2017 sebesar 5,7 persen. Hal ini juga terjadi pada

beberapa provinsi lainnya di Pulau Jawa yang disebabkan oleh menurunnya tingkat investasi maupun pendapatan pemerintah di setiap provinsinya.

Dengan pertumbuhan ekonomi yang dicapai saat ini, setiap provinsi di Pulau Jawa masih harus menghadapi permasalahan yang mungkin juga dihadapi oleh provinsi-provinsi lain di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang mantap tentunya memerlukan kapital atau modal. Kapital atau modal tersebut adalah investasi yang dilakukan oleh Penanam Modal pihak Asing (PMA) maupun Penanaman Modal oleh investor Dalam Negeri (PMDN) di masing provinsi di Pulau Jawa.

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dari tahun 2014-2017 terlihat berfluktuasi dari tahun ke tahun, baik dilihat dari nilai realisasi investasi maupun persentase laju investasi yang terjadi seperti yang ditunjukkan dalam gambar 1.2.



**Gambar 1.2 Penanaman Modal Dalam Negeri di Pulau Jawa Tahun 2014 – 2017**

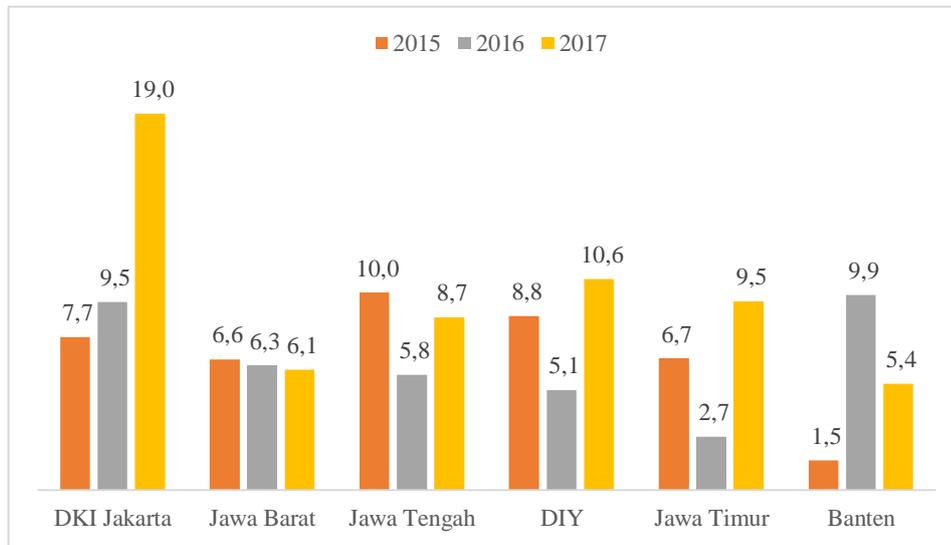
*Sumber: Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri menurut Provinsi, 2006-2017. Badan Pusat Statistik. Data telah diolah.*

Berdasarkan gambar 1.2 terlihat tingkat pertumbuhan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di setiap provinsi mengalami fluktuasi. Pada tahun 2014 PMDN Provinsi Jawa Barat mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi mencapai 107,9 persen, walaupun pada tahun berikutnya yaitu tahun 2015 dan 2016 mengalami penurunan hingga mencapai 15,6 persen. Tahun 2017 pertumbuhan PMDN kembali mengalami peningkatan yaitu menjadi 26,5 persen.

Dilihat dari perkembangan laju pertumbuhan PMDN di Pulau Jawa tersebut, provinsi yang memiliki nilai rata-rata terendah adalah Provinsi Jawa Timur dengan besarnya rata-rata yaitu 7,6 persen, sedangkan untuk nilai rata-rata terbesar berada pada Provinsi DKI Jakarta yaitu sebesar 115,6 persen.

Berfluktuasinya realisasi PMDN ini disebabkan karena penanaman modal per sektor setiap tahunnya berbeda. Penanaman modal yang dilakukan investor di delapan sektor ekonomi dari satu tahun ke tahun lainnya sangat tidak ada kontinuitas karena investor hanya menanam modal di sektor ekonomi yang diminatinya. Selain itu kondisi ekonomi dan politik dalam negeri, tuntutan upah dan minimnya infrastruktur juga menyebabkan nilai PMDN mengalami fluktuasi yang sangat mencolok tiap tahunnya.

Sejalan dengan upaya untuk meningkatkan serta menggali sumber-sumber penerimaan daerah maka pemerintah di setiap provinsi berusaha secara aktif untuk meningkatkan serta menggali sumber-sumber penerimaan daerah terutama penerimaan yang berasal dari daerahnya sendiri. Hal ini bisa dilihat dari nilai Pendapatan Asli Daerah di Pulau Jawa.



**Gambar 1.3 Pendapatan Asli Daerah provinsi di Pulau Jawa Tahun 2015 – 2017**

*Sumber: Realisasi APBD per masing-masing tahun. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Data telah diolah.*

Pada gambar 1.3 dapat dilihat penerimaan daerah melalui PAD yang digali oleh pemerintah di masing-masing provinsi di Pulau Jawa dari tahun 2015-2017 mengalami pertumbuhan yang berfluktuasi dari tahun ke tahun. Tahun 2015, laju pertumbuhan PAD Provinsi Banten hanya sebesar 1,5 persen, kemudian meningkat sampai dengan 9,9 persen pada tahun 2016. Walaupun menurut data nilai realisasi PAD mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, namun jika dilihat dari persentasi pertumbuhannya, PAD di setiap provinsi di Pulau Jawa tersebut mengalami fluktuasi yang sangat mencolok setiap tahunnya.

Dari data tersebut, didapat jumlah rata-rata pertumbuhan PAD di masing-masing provinsi di Pulau Jawa tahun 2015-2017, Provinsi Banten menjadi daerah yang memiliki nilai rata-rata paling rendah, yaitu sebesar 5,6 persen dengan puncak pertumbuhan paling tinggi berada pada tahun 2016 sebesar 9,9 persen. Lalu provinsi dengan jumlah rata-rata pertumbuhan tertinggi adalah Provinsi DKI

Jakarta dengan rata-rata 12,1 persen, yang di mana pertumbuhan paling tingginya sebesar 19,0 persen di tahun 2017 dan yang terendah pada tahun 2015 sebesar 7,7 persen.

Selain Pendapatan Asli Daerah dan Penanaman Modal Dalam Negeri, Dana Perimbangan pun merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa. Nilai realisasi maupun persentase laju Dana Perimbangan yang terjadi dapat ditunjukkan dalam tabel 1.2.

**Tabel 1.2 Dana Perimbangan provinsi di Pulau Jawa Tahun 2014 – 2017**

Provinsi	2014	LP (%)	2015	LP (%)	2016	LP (%)	2017	LP (%)
<b>DKI Jakarta</b>	9.677,5	<b>3,1</b>	5.887,3	- <b>39,2</b>	15.271,7	<b>159,4</b>	18.969,3	<b>24,2</b>
<b>Jawa Barat</b>	3.260,5	<b>10,5</b>	2.506,9	- <b>23,1</b>	10.622,7	<b>323,7</b>	13.981,4	<b>31,6</b>
<b>Jawa Tengah</b>	2.542,6	<b>3,0</b>	2.257,1	- <b>11,2</b>	8.017,3	<b>255,2</b>	11.067,8	<b>38,0</b>
<b>DIY</b>	1.013,8	<b>5,9</b>	1.021,9	<b>0,8</b>	1.697,1	<b>66,1</b>	2.379,9	<b>40,2</b>
<b>Jawa Timur</b>	3.485,3	<b>25,6</b>	3.115,6	- <b>10,6</b>	9.039,0	<b>190,1</b>	12.494,0	<b>38,2</b>
<b>Banten</b>	1.159,9	<b>3,0</b>	976,8	- <b>15,8</b>	3.185,6	<b>226,1</b>	3.930,0	<b>23,4</b>

*Sumber: Realisasi APBD per masing-masing tahun. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Data Telah Diolah.*

Pada tabel 1.2 dapat dilihat besarnya Dana Perimbangan yang diberikan pemerintah pusat terhadap pemerintah di setiap provinsi di Pulau Jawa mengalami fluktuasi yang cukup tinggi. Khususnya di tahun 2016, laju pertumbuhan meningkat pesat untuk seluruh provinsi yang ada. Di mana salah-satunya yang terjadi pada Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah menerima sebesar 3.260,5 miliar rupiah di tahun 2014 kemudian mengalami penurunan menjadi 2.506,9 miliar rupiah dengan tingkat laju pertumbuhannya mencapai -23,1 persen. Tahun selanjutnya di tahun 2016, tanpa diduga mengalami kenaikan yang sangat pesat mencapai 323,7 persen dengan besarnya jumlah dana yaitu 10.662,7 miliar rupiah.

Apabila dihitung jumlah rata-rata laju pertumbuhannya, Provinsi Jawa Barat menjadi daerah yang memiliki tingkat penerimaan Dana Perimbangan tertinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya di Pulau Jawa, dengan persentase laju sebesar 85,7 persen di mana nilai tertingginya berada pada tahun 2016 sebesar 323,7 persen dan terendah 2015 sebesar -23,1 persen, sedangkan provinsi yang mendapatkan penerimaan dana terendah adalah Provinsi D.I. Yogyakarta dengan nilai rata-rata laju pertumbuhan dana sebesar 28,2 persen, yang dimana laju pertumbuhan tertinggi berada pada tahun 2016 yaitu sebesar 66,1 persen dan terendah 0,8 persen di tahun 2015.

Peneliti terdahulu, di antaranya oleh Abdul Mafahir, dkk. (2017) memperoleh hasil bahwa PAD berpengaruh tidak signifikan dan bersifat negatif terhadap PDRB. Selain itu, Yody Prawira Sunardi, dkk. (2017) menemukan bahwa PAD dan Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Trias Fajar N. dan Hastarini Dwi A. (2013), memperoleh hasil bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB, sedangkan PMDN tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB.

Berdasarkan data dan fenomena dari perbedaan hasil penelitian terdahulu maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengembangkan serta mengkaji ulang variabel-variabel yang diduga mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Pulau Jawa selama tahun 2010-2017. Penelitian ini mengangkat tiga variabel bebas yaitu Pendapatan Asli

Daerah, Dana Perimbangan, dan Penanaman Modal Dalam Negeri. Untuk variabel terikatnya yaitu Produk Domestik Regional Bruto.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka penelitian dengan judul **“PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA PERIMBANGAN DAN PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN) TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) DI PULAU JAWA”** penting untuk dilakukan.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka identifikasi masalah yang dapat diambil sebagai dasar kajian dalam penelitian yang dilakukan, yaitu:

1. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Penanaman Modal Dalam Negeri secara parsial terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto di tiap provinsi di Pulau Jawa.
2. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Penanaman Modal Dalam Negeri secara bersama-sama terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto di tiap provinsi di Pulau Jawa.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Penanaman Modal Dalam Negeri secara parsial

terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto di tiap provinsi di Pulau Jawa.

2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Penanaman Modal Dalam Negeri secara Bersamaan terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto di tiap provinsi di Pulau Jawa.

#### **1.4 Kegunaan Hasil Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan adalah:

1. Manfaat Akademis
  - a. Sebagai sarana untuk mengembangkan wawasan pengetahuan masyarakat mengenai masalah keuangan daerah.
  - b. Sebagai acuan bagi peneliti lainnya di bidang yang sama dan sebagai bahan referensi bagi pembaca untuk wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang keuangan daerah.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah untuk mengefektifkan penerimaan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di tiap provinsi di Pulau Jawa dalam rangka memaksimalkan pemberdayaan potensi daerah yang ada.

#### **1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian**

##### **1.5.1 Lokasi Penelitian**



